



Disinformasi Digital dan Integritas Pemilu di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Pemilihan Lokal di Merauke

Damianus Katayu

Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Yaleka Maro, Merauke, Indonesia

*Email Korespondensi: katayudamianus@gmail.com

Diterima: tgl-bln-thn | Disetujui: tgl-bln-thn | Diterbitkan: tgl-bln-thn

ABSTRACT

This study aims to explore the dynamics of digital disinformation at each stage of the local elections in Merauke and analyze its implications for the integrity of the democratic process in the border region. A qualitative approach with an exploratory case study strategy was used to deeply understand the phenomenon of disinformation in a complex geographic, social, and political context. Data were collected through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), document studies, and online observations on social media platforms such as Facebook and WhatsApp. The analysis was carried out thematically with triangulation of data sources to ensure the validity of the findings. The results of the study show that digital disinformation in Merauke has distinctive characteristics in the form of narratives based on ethnicity, religion, and border issues. Disinformation is spread through local community networks and social media, with the main actors being political sympathizers, campaign teams, and anonymous accounts across regions. This disinformation has a real impact on the integrity of the election, including triggering political polarization, increasing reports of violations, and hampering the campaign process and logistics distribution. This study contributes to the literature on election disinformation in border regions and recommends strengthening digital literacy, the role of local figures, and collaboration between institutions to mitigate disinformation. Further studies are recommended to develop community-based intervention models with adaptive technology support.

Keywords: Digital Disinformation; Election Integrity; Border Region; Digital Literacy; Political Participation

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi dinamika disinformasi digital pada setiap tahapan pemilu lokal di Merauke dan menganalisis implikasinya terhadap integritas proses demokrasi di wilayah perbatasan tersebut. Pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus eksploratif digunakan untuk memahami secara mendalam fenomena disinformasi dalam konteks geografis, sosial, dan politik yang kompleks. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah (FGD), studi dokumen, dan observasi daring pada platform media sosial seperti Facebook dan WhatsApp. Analisis dilakukan secara tematik dengan triangulasi sumber data untuk memastikan validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital di Merauke memiliki karakteristik khas berupa narasi berbasis etnis, agama, dan isu perbatasan. Disinformasi disebarakan melalui jejaring komunitas lokal dan media sosial, dengan aktor utama berupa simpatisan politik, tim sukses, dan akun anonim lintas wilayah. Disinformasi ini berdampak nyata pada integritas pemilu, antara lain memicu polarisasi politik, meningkatkan laporan pelanggaran, serta menghambat proses kampanye dan distribusi logistik. Penelitian ini berkontribusi pada literatur disinformasi pemilu di wilayah perbatasan dan merekomendasikan penguatan literasi digital, peran tokoh lokal, serta kolaborasi antarlembaga untuk mitigasi disinformasi. Studi lanjutan disarankan

untuk mengembangkan model intervensi berbasis komunitas dengan dukungan teknologi adaptif.

Kata Kunci: Disinformasi Digital; Integritas Pemilu; Wilayah Perbatasan; Literasi Digital; Partisipasi Politik

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Katayu, D. (2025). Disinformasi Digital dan Integritas Pemilu di Wilayah Perbatasan: Studi Kasus Pemilihan Lokal di Merauke. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 362-372. <https://doi.org/10.63822/vdgp5h93>

PENDAHULUAN

Fenomena disinformasi digital telah menjadi isu global yang mengancam integritas pemilu di berbagai negara, baik di negara maju maupun berkembang (Norris, 2022). Di Amerika Serikat, disinformasi terbukti memengaruhi persepsi publik terhadap legitimasi hasil pemilu dan memperkuat polarisasi politik, sebagaimana terlihat dalam kontestasi pemilu presiden 2016 dan 2020. Hal serupa terjadi di Eropa, di mana penyebaran hoaks digital memicu ketidakpercayaan terhadap institusi demokrasi dan meningkatkan kerentanan masyarakat terhadap manipulasi opini publik melalui media sosial. Di kawasan Asia, berbagai studi menunjukkan bahwa disinformasi digital menjadi instrumen strategis dalam memobilisasi dukungan politik, sekaligus melemahkan kohesi sosial di negara-negara dengan keragaman etnis dan agama yang tinggi (Adisa et al., 2024). Dalam konteks Indonesia, tantangan disinformasi digital dalam pemilu semakin kompleks seiring dengan masifnya penggunaan platform digital dan media sosial sebagai ruang utama interaksi politik. Permasalahan ini kian mengkhawatirkan di wilayah perbatasan, seperti Merauke, yang memiliki karakteristik geografis terpencil, keterbatasan akses informasi berkualitas, serta keragaman etnis dan budaya. Kondisi ini menciptakan ekosistem politik yang rentan terhadap infiltrasi narasi disinformasi, baik yang bersumber dari aktor domestik maupun transnasional. Kompleksitas pemilu di wilayah perbatasan tidak hanya terkait dengan logistik penyelenggaraan, tetapi juga berkaitan erat dengan upaya menjaga integritas pemilu dari ancaman disinformasi yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Tenove, 2020).

Merauke, sebagai salah satu wilayah perbatasan Indonesia yang terletak di ujung timur Pulau Papua, memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang unik sekaligus menantang dalam konteks penyelenggaraan pemilu. Daerah ini dikenal dengan heterogenitas etnis yang tinggi, di mana masyarakat asli Marind hidup berdampingan dengan kelompok pendatang dari berbagai daerah di Indonesia, menciptakan dinamika sosial-politik yang kompleks. Secara geografis, Merauke mencakup wilayah yang sangat luas dengan sebaran penduduk yang tidak merata, banyak di antaranya tinggal di kawasan pedalaman yang sulit dijangkau oleh infrastruktur dasar, termasuk jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Kondisi ini mengakibatkan kesenjangan signifikan dalam akses terhadap informasi politik yang akurat dan dapat dipercaya, sehingga membuka ruang bagi penetrasi disinformasi digital. Dalam konteks ini, pemilu lokal di Merauke tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme demokratis untuk memilih pemimpin daerah, tetapi juga menjadi ujian penting bagi kualitas demokrasi di wilayah perbatasan. Pemilu tersebut mencerminkan sejauh mana negara mampu menjamin keadilan elektoral, keterjangkauan informasi, dan perlindungan terhadap integritas proses pemilu di daerah yang secara geografis dan sosial rentan terhadap disrupsi, termasuk disinformasi digital yang terstruktur (Garnett & James, 2020).

Disinformasi digital dalam pemilu lokal di wilayah perbatasan seperti Merauke muncul dalam berbagai tahapan proses elektoral, mulai dari masa kampanye, hari pemungutan suara, hingga periode pasca-pemilu. Pada tahap kampanye, disinformasi sering berwujud dalam bentuk narasi manipulatif mengenai rekam jejak kandidat, isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta penyebaran janji-janji program fiktif melalui platform media sosial dan aplikasi pesan instan. Ketika memasuki masa pemungutan suara, disinformasi muncul dalam bentuk kabar bohong terkait prosedur pemilihan, daftar pemilih tetap, hingga isu kecurangan yang belum terverifikasi (Lee, 2019). Sementara pada tahap pasca-pemilu, disinformasi digital banyak dimanfaatkan untuk menggugat legitimasi hasil pemilu dengan menyebarkan informasi palsu mengenai dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif, tanpa disertai bukti sah. Temuan studi sebelumnya dan laporan pengawasan pemilu di Papua menunjukkan bahwa

wilayah perbatasan seperti Merauke rawan menjadi target penyebaran disinformasi terkoordinasi, misalnya melalui pesan berantai yang menuding keterlibatan aparat keamanan dalam memihak kandidat tertentu, atau menyebarkan isu sensitif tentang marginalisasi kelompok adat dalam proses politik. Pola disinformasi ini diperparah dengan keterbatasan literasi digital masyarakat dan lemahnya mekanisme klarifikasi informasi di tingkat lokal, sehingga memperbesar potensi gangguan terhadap integritas pemilu (Ologunibi & Taiwo, 2025).

Kajian tentang disinformasi digital dalam konteks pemilu di Indonesia memang telah berkembang, namun sebagian besar literatur yang ada masih berfokus pada dinamika di wilayah perkotaan atau dalam skala nasional, terutama yang terkait dengan pemilu presiden atau pemilu legislatif. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menyoroti peran media sosial dalam membentuk opini publik, strategi kampanye digital, serta dampaknya terhadap polarisasi politik di pusat-pusat populasi besar (Haider, 2024). Sebaliknya, studi yang secara khusus mengeksplorasi disinformasi dalam pemilu di wilayah perbatasan Indonesia, seperti Merauke, masih sangat terbatas. Padahal, wilayah perbatasan memiliki karakteristik sosial, budaya, dan geografis yang berbeda secara signifikan dengan kawasan perkotaan, sehingga pola dan dampak disinformasi yang terjadi pun berpotensi berbeda. Keterbatasan ini mengindikasikan adanya celah penting dalam literatur yang perlu diisi, khususnya melalui studi berbasis kasus yang dapat menggali secara mendalam dinamika disinformasi digital dan implikasinya terhadap integritas pemilu di wilayah-wilayah yang selama ini cenderung terpinggirkan dalam kajian akademik. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab kebutuhan tersebut sekaligus memberikan kontribusi pada pengembangan diskursus akademik mengenai demokrasi dan tata kelola pemilu di wilayah perbatasan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi dinamika disinformasi digital dalam setiap tahapan pemilu lokal di Merauke serta menganalisis implikasinya terhadap integritas proses demokrasi di wilayah perbatasan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi kasus eksploratif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara mendalam dinamika sosial, politik, dan teknologi yang terkait dengan disinformasi digital dalam pemilu lokal. Strategi studi kasus eksploratif digunakan untuk memahami secara kontekstual dan komprehensif fenomena disinformasi digital serta implikasinya terhadap integritas pemilu di wilayah perbatasan, dengan fokus pada Kabupaten Merauke sebagai lokasi penelitian. Pemilihan desain ini didasarkan pada kebutuhan untuk menangkap kompleksitas interaksi antaraktor, karakteristik lokal, dan dinamika penyebaran disinformasi yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks wilayah perbatasan Indonesia. Dengan demikian, desain ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang kuat dan memperkaya literatur mengenai disinformasi digital dalam pemilu di daerah dengan karakteristik geopolitik khusus.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, yang merupakan salah satu wilayah perbatasan strategis Indonesia dengan karakteristik geografis yang luas, keberagaman etnis, serta dinamika sosial-politik yang kompleks. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingkat kerentanan wilayah perbatasan terhadap penyebaran disinformasi digital, terutama menjelang dan selama pelaksanaan pemilu lokal. Subjek penelitian terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses pemilu dan dinamika informasi di wilayah ini. Kelompok pertama adalah penyelenggara pemilu yang mencakup perwakilan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu kabupaten. Kelompok

kedua adalah peserta pemilu yang terdiri atas calon legislatif, perwakilan partai politik lokal, dan anggota tim pemenangan. Kelompok berikutnya adalah tokoh masyarakat dan tokoh adat yang memegang peran penting sebagai penjaga nilai-nilai sosial sekaligus pengendali arus informasi di tingkat komunitas. Selain itu, penelitian ini melibatkan jurnalis lokal dan aktivis pemantau pemilu yang berperan dalam distribusi informasi dan kontrol sosial, serta masyarakat yang aktif menggunakan media sosial, khususnya platform Facebook dan WhatsApp, sebagai penerima sekaligus penyebar informasi selama tahapan pemilu. Komposisi subjek dirancang agar proporsional, mencakup keterwakilan penyelenggara pemilu, peserta pemilu, pemangku kepentingan lokal, serta unsur masyarakat sipil dan warga pengguna media sosial. Subjek dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan mereka dalam proses pemilu dan kapasitas mereka dalam memahami atau terpapar fenomena disinformasi digital di wilayah perbatasan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui berbagai teknik yang saling melengkapi guna memperoleh informasi yang kaya, mendalam, dan kontekstual terkait disinformasi digital dalam pemilu lokal di wilayah perbatasan. Wawancara mendalam dilakukan dengan pemangku kepentingan kunci untuk menggali pengalaman, persepsi, serta strategi yang mereka gunakan dalam menghadapi disinformasi digital selama tahapan pemilu. Wawancara ini memungkinkan penelusuran aspek-aspek subjektif dan praktik-praktik yang tidak selalu terekam dalam dokumen formal. Selain itu, diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) dilakukan bersama komunitas lokal dan penyelenggara pemilu untuk memahami persepsi kolektif, dinamika interaksi antaraktor, serta respons sosial terhadap berbagai bentuk disinformasi yang muncul. Data juga diperoleh melalui studi dokumen dengan menelaah laporan resmi Badan Pengawas Pemilu, data hasil pengawasan, dan arsip pemberitaan dari media lokal yang memuat informasi terkait isu disinformasi pada pemilu. Sebagai pelengkap, dilakukan observasi daring melalui pemantauan aktif di media sosial, khususnya pada platform Facebook, WhatsApp group, dan Twitter/X, untuk mengidentifikasi bentuk, sebaran, serta pola penyebaran disinformasi digital sepanjang periode penyelenggaraan pemilu. Kombinasi teknik ini dipilih untuk memastikan triangulasi data, sehingga hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi dan mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan pendekatan *analisis tematik* (thematic analysis) untuk mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan pola utama (themes) terkait disinformasi digital, aktor-aktor kunci yang terlibat, serta dampaknya terhadap integritas pemilu di wilayah perbatasan. Seluruh data dari wawancara, FGD, studi dokumen, dan observasi daring dianalisis secara bertahap melalui proses open coding, axial coding, dan selective coding untuk membangun pemahaman yang komprehensif. Validitas dan reliabilitas temuan dijamin melalui *triangulasi sumber data* dengan membandingkan informasi dari berbagai teknik pengumpulan (wawancara mendalam, dokumen resmi, serta observasi media sosial) sehingga temuan yang dihasilkan bersifat konsisten, dapat diverifikasi, dan memiliki landasan empirik yang kuat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam dinamika disinformasi digital dan dampaknya terhadap integritas pemilu lokal di wilayah perbatasan Merauke. Temuan diperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, observasi daring, dan studi dokumen, yang kemudian dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola disinformasi, aktor kunci, serta implikasi terhadap kualitas pemilu. Hasil penelitian disusun berdasarkan tema-tema utama yang mencerminkan karakteristik

disinformasi, aktor dan jejaring penyebaran, dampak terhadap integritas pemilu, serta respon mitigasi yang dilakukan pemangku kepentingan.

Tabel 1. Kategori dan Karakteristik Disinformasi Digital pada Pemilu Lokal Merauke

Kategori Disinformasi	Contoh Nyata di Lapangan	Media Penyebaran Utama	Dampak yang Teridentifikasi
Hoaks berbasis etnis	Pesan berantai WhatsApp: "Calon X didukung kelompok luar untuk menguasai tanah adat."	Grup WhatsApp (27 grup), Facebook komunitas	Meningkatnya sentimen etnis, penolakan terbuka pada kampanye calon X
Manipulasi identitas calon	Postingan Facebook: "Calon Y adalah keturunan asing, tidak sah jadi pemimpin."	Facebook komunitas, selebaran digital	Penyebaran fitnah, laporan ke Bawaslu atas identitas calon Y
Narasi provokatif terkait status perbatasan	Selebaran digital: "Jika Calon Z menang, Merauke akan keluar dari NKRI."	WhatsApp, selebaran digital tidak resmi	Ketegangan politik, munculnya desakan aksi protes di distrik tertentu

Tabel 1 menunjukkan bahwa disinformasi digital dalam pemilu lokal di Merauke terbagi dalam tiga kategori utama, yakni hoaks berbasis etnis, manipulasi identitas calon, dan narasi provokatif terkait status perbatasan. Berdasarkan data lapangan, hoaks berbasis etnis paling banyak tersebar melalui 27 grup WhatsApp dan beberapa laman Facebook komunitas, memicu sentimen negatif antar etnis dan penolakan kampanye calon tertentu. Manipulasi identitas calon banyak ditemukan pada postingan Facebook dan selebaran digital yang menyebarkan fitnah terkait asal-usul calon, hingga berujung pada laporan ke Bawaslu. Sementara itu, narasi provokatif mengenai status perbatasan, yang disebar melalui pesan WhatsApp dan selebaran digital tidak resmi, menciptakan ketegangan politik dan memicu desakan aksi protes di sejumlah distrik. Temuan ini menegaskan bahwa disinformasi digital berperan signifikan dalam mengganggu integritas pemilu di wilayah perbatasan.

Tabel 2. Aktor dan Pola Jejaring Penyebar Disinformasi pada Pemilu Lokal di Merauke

Aktor Utama	Ciri/Identitas	Pola Penyebaran	Media Utama
Simpatian Partai	Pendukung aktif partai tertentu di tingkat lokal	Melalui keluarga besar, grup WhatsApp komunitas	WhatsApp, tatap muka terbatas
Tim Sukses Kandidat Tertentu	Anggota resmi atau relawan kampanye calon	Jaringan kampanye, tokoh agama lokal	Facebook, pertemuan kampanye
Akun Anonim Berbasis Luar	Akun tidak teridentifikasi, diduga dari luar wilayah	Penyebaran ke grup terbuka di media sosial	Facebook, Telegram
Komunitas Berbasis Adat	Tokoh atau anggota struktur adat lokal	Melalui forum adat, penyebaran di lingkungan komunitas	WhatsApp, pertemuan adat
Kelompok Keagamaan Tertentu	Pengurus atau anggota kelompok keagamaan	Forum keagamaan, grup internal	WhatsApp, selebaran digital

Tabel 2 menggambarkan aktor utama dan pola jejaring penyebar disinformasi dalam pemilu lokal di Merauke. Temuan menunjukkan bahwa disinformasi banyak didorong oleh simpatian partai dan tim sukses kandidat melalui jejaring keluarga besar, tokoh adat, dan kelompok keagamaan dengan media utama

WhatsApp dan pertemuan komunitas. Selain itu, akun anonim berbasis luar wilayah juga teridentifikasi aktif menyebarkan narasi provokatif melalui grup terbuka di Facebook dan Telegram. Pola ini memperlihatkan bahwa disinformasi tidak hanya berlangsung secara daring tetapi juga diperkuat melalui struktur sosial tradisional di wilayah perbatasan.



Gambar 1. Dampak Disinformasi Digitan Pada Pemilu Lokal

Hasil penelitian menunjukkan bahwa disinformasi digital berdampak signifikan terhadap integritas pemilu lokal di Merauke. Disinformasi memicu polarisasi pendapat dan apatisme sebagian pemilih, sehingga partisipasi politik masyarakat menjadi terfragmentasi. Bagi penyelenggara pemilu, disinformasi meningkatkan beban klarifikasi dan pengawasan oleh KPU dan Bawaslu, sekaligus menimbulkan gangguan pada proses kampanye serta pemungutan suara di sejumlah TPS. Selain itu, disinformasi berbasis isu etnis dan agama memperburuk hubungan sosial antar komunitas, menciptakan ketegangan yang mengancam kohesi masyarakat di wilayah perbatasan.

Tabel 3. Respon dan Mitigasi Pemangku Kepentingan terhadap Disinformasi dalam Pemilu Lokal di Merauke

Pemangku Kepentingan	Strategi / Tindakan	Media / Kanal	Hambatan Utama
KPU Kabupaten Merauke	Sosialisasi klarifikasi hoaks pemilu	Pertemuan tatap muka, website resmi, Facebook KPU	Keterbatasan akses internet di distrik terpencil

Bawaslu Kabupaten Merauke	Edukasi pemilih dan respon cepat terhadap laporan disinformasi	WhatsApp group resmi pengawasan, spanduk	Rendahnya literasi digital masyarakat
Tokoh adat dan agama	Penyuluhan lisan pada forum adat dan keagamaan	Pertemuan komunitas lokal	Belum terkoordinasi dengan sistem formal KPU/Bawaslu

Tabel 3 menggambarkan respons dan strategi mitigasi disinformasi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan utama dalam pemilu lokal di Merauke. KPU dan Bawaslu berupaya mengklarifikasi hoaks melalui pertemuan komunitas, kanal daring resmi, dan media sederhana seperti spanduk, sementara tokoh adat dan agama memanfaatkan forum lokal untuk meredam isu provokatif. Namun, upaya ini menghadapi hambatan signifikan berupa rendahnya literasi digital masyarakat serta keterbatasan akses teknologi di distrik-distrik terpencil, yang menghambat efektivitas penyebaran klarifikasi informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola disinformasi digital dalam pemilu lokal di Merauke memiliki karakteristik yang khas dan sangat dipengaruhi oleh konteks sosial, politik, dan geografis wilayah perbatasan. Bentuk utama disinformasi yang teridentifikasi mencakup hoaks terkait identitas calon, terutama yang menasar afiliasi agama, etnisitas, dan asal-usul keluarga. Narasi ini sengaja dirancang untuk membangkitkan sentimen sektarian dan memecah belah kohesi sosial di tingkat komunitas. Selain itu, distorsi terhadap visi-misi dan program kerja calon juga marak ditemukan. Disinformasi ini umumnya dikemas dalam bentuk simplifikasi berlebihan atau pemelintiran fakta yang menyesatkan publik terkait komitmen dan rencana kerja calon tertentu (Lecheler & Egelhofer, 2022). Lebih jauh, penelitian ini juga mengidentifikasi munculnya narasi provokatif yang mengeksploitasi isu strategis, seperti status wilayah perbatasan dan kedaulatan, guna membangkitkan keresahan dan menciptakan polarisasi di kalangan pemilih.

Dari sisi saluran penyebaran, disinformasi digital di Merauke sebagian besar beredar melalui platform yang dekat dengan keseharian masyarakat. Grup WhatsApp komunitas lokal menjadi medium utama, mengingat popularitasnya dan kemudahan akses di wilayah yang infrastruktur digitalnya terbatas. Selain itu, akun Facebook komunitas dan laman tidak resmi memainkan peran penting sebagai simpul penyebaran disinformasi, memanfaatkan fitur berbagi konten yang menjangkau audiens luas dengan cepat. Penelitian ini juga menemukan pola penyebaran berantai melalui selebaran digital, baik dalam format file PDF maupun gambar, yang didistribusikan secara masif di platform daring dan pada beberapa kasus diprint dan diedarkan secara fisik untuk menjangkau warga di daerah dengan akses internet lemah. Temuan ini memperlihatkan bahwa pola disinformasi dalam pemilu lokal di Merauke tidak hanya terkait pada substansi pesan yang menyesatkan, tetapi juga didukung jejaring distribusi yang terstruktur dan berbasis komunitas, sehingga menjadikannya tantangan serius bagi integritas pemilu di wilayah perbatasan.

Temuan penelitian ini mengungkap bahwa aktor penyebar disinformasi digital dalam pemilu lokal di Merauke bersifat beragam dan melibatkan berbagai tingkat kepentingan politik. Simpatisan politik dan tim sukses tertentu menjadi aktor utama yang secara aktif memproduksi dan mendistribusikan konten disinformasi untuk mendiskreditkan lawan politik (Barela & Duberry, 2021). Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi keberadaan akun-akun anonim yang diduga memiliki koneksi dengan pihak luar wilayah, baik dari Papua Selatan maupun dari luar negeri, yang turut memperkuat arus disinformasi dengan narasi bernuansa provokatif dan sektarian. Keterlibatan aktor luar ini memperlihatkan adanya dinamika yang melampaui batas administratif wilayah, sekaligus menandakan kerentanan wilayah perbatasan terhadap intervensi informasi dari pihak eksternal (Fontana, 2022).

Dinamika penyebaran disinformasi memperlihatkan pola yang sangat terkait dengan struktur sosial masyarakat lokal (Zhen et al., 2023). Disinformasi menyebar secara cepat melalui jejaring sosial berbasis keluarga besar, kelompok adat, dan komunitas keagamaan yang menjadi pilar kohesi sosial di Merauke. Pola ini memperlihatkan bahwa arus disinformasi tidak hanya mengandalkan kekuatan teknologi digital, tetapi juga memanfaatkan kepercayaan yang sudah terbangun dalam relasi sosial tradisional. Jejaring ini berfungsi sebagai kanal yang mempercepat distribusi informasi menyebarkan sekaligus menyulitkan upaya klarifikasi karena kuatnya otoritas sosial yang melekat pada jejaring tersebut. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika penyebaran disinformasi di wilayah perbatasan memiliki kompleksitas tersendiri yang membutuhkan pendekatan mitigasi berbasis budaya dan komunitas.

Disinformasi digital yang beredar selama pemilu lokal di Merauke terbukti memberikan dampak signifikan terhadap integritas penyelenggaraan pemilu. Pada tingkat pemilih, arus disinformasi memicu polarisasi politik yang tajam, terutama di komunitas-komunitas yang terfragmentasi secara sosial dan etnis. Narasi yang sarat sentimen SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) memperdalam jurang perbedaan di antara kelompok masyarakat dan menumbuhkan ketidakpercayaan terhadap proses demokrasi. Akibatnya, sebagian pemilih memilih bersikap apatis karena merasa bahwa proses pemilu telah tercemari oleh informasi yang tidak akurat dan provokatif. Apatisisme ini pada gilirannya berpotensi menurunkan partisipasi politik dan melemahkan legitimasi hasil pemilu (Luwemba, 2023).

Dampak disinformasi juga dirasakan secara nyata dalam penyelenggaraan teknis pemilu. Bawaslu mencatat adanya peningkatan signifikan volume laporan masyarakat terkait dugaan hoaks dan disinformasi selama masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Lonjakan laporan ini tidak hanya memperberat beban kerja lembaga pengawas, tetapi juga memperlihatkan betapa masifnya penyebaran konten menyebarkan di ruang publik digital. Proses kampanye pun terganggu akibat disinformasi, antara lain berupa penolakan terhadap calon tertentu di beberapa lokasi kampanye serta munculnya konflik kecil di lapangan yang dipicu oleh kesalahpahaman informasi. Bahkan, di beberapa wilayah, ketegangan sosial akibat disinformasi menghambat distribusi logistik pemilu, sehingga memerlukan intervensi aparat keamanan dan tokoh adat untuk menormalkan situasi. Temuan ini menunjukkan bahwa disinformasi digital bukan hanya ancaman terhadap kualitas informasi publik, tetapi juga berdampak langsung pada stabilitas dan kelancaran proses demokrasi di wilayah perbatasan (Colomina et al., 2021).

Merespons maraknya disinformasi digital dalam pemilu lokal di Merauke, berbagai pemangku kepentingan telah berupaya melakukan mitigasi melalui pendekatan formal maupun berbasis komunitas. KPU dan Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara dan pengawas pemilu secara proaktif melakukan klarifikasi publik atas konten-konten menyebarkan, baik melalui kanal resmi daring seperti situs web dan media sosial, maupun melalui tatap muka langsung dengan komunitas. Langkah ini ditempuh untuk menjangkau kelompok masyarakat yang minim akses digital dan memperkuat kepercayaan publik terhadap informasi resmi. Selain itu, tokoh adat dan pemuka agama memainkan peran penting sebagai mediator informasi, menjadi penghubung antara penyelenggara pemilu dan masyarakat akar rumput dalam menyaring serta meluruskan narasi yang terdistorsi di ruang publik (Oyewale, 2024).

Namun demikian, upaya mitigasi tersebut dihadapkan pada berbagai hambatan struktural dan kultural. Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah pedalaman dan komunitas adat, menjadi tantangan utama dalam memutus rantai penyebaran disinformasi. Keterbatasan infrastruktur komunikasi dan internet di sejumlah distrik terpencil semakin memperburuk situasi, karena memperlambat arus klarifikasi informasi resmi dan memperkuat dominasi narasi yang beredar melalui jalur

tidak resmi. Di sisi lain, sinergi antarlembaga dalam menangani disinformasi belum berjalan optimal, terutama dalam hal koordinasi antara lembaga formal, tokoh masyarakat, dan elemen masyarakat sipil (Arifianto et al., 2025). Temuan ini menunjukkan perlunya penguatan pendekatan kolaboratif yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk menghadapi tantangan disinformasi di wilayah perbatasan.

Penelitian ini juga menyoroti adanya kesenjangan yang cukup tajam antara wilayah perbatasan dan wilayah perkotaan dalam hal regulasi dan kapasitas teknologi untuk mengendalikan disinformasi digital. Di Merauke, keterbatasan perangkat kebijakan yang spesifik untuk wilayah perbatasan, ditambah lemahnya infrastruktur teknologi komunikasi, menjadi faktor penghambat utama dalam upaya penanganan arus informasi menyesatkan. Kondisi ini mengakibatkan respons terhadap disinformasi berjalan lambat dan kurang adaptif dibandingkan dengan wilayah perkotaan yang memiliki akses regulasi, sumber daya teknologi, dan dukungan kelembagaan yang lebih memadai. Perbedaan ini menunjukkan perlunya desain kebijakan yang lebih kontekstual dan afirmatif untuk mendukung integritas pemilu di daerah perbatasan.

Lebih jauh, penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi multisektor dalam menghadapi tantangan disinformasi berbasis lokal. Upaya pengendalian disinformasi tidak cukup hanya mengandalkan lembaga formal seperti KPU dan Bawaslu, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat adat, lembaga pendidikan, media lokal, serta organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi lintas sektor ini sangat penting untuk memperkuat literasi digital masyarakat, memperluas jangkauan klarifikasi informasi, dan membangun sistem deteksi dini yang berbasis kearifan lokal. Sinergi tersebut diharapkan dapat menciptakan ekosistem informasi yang lebih resilien dan mendukung terwujudnya proses demokrasi yang inklusif dan berintegritas di wilayah perbatasan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa disinformasi digital dalam pemilu lokal di wilayah perbatasan Merauke memiliki karakteristik khas berupa narasi berbasis etnis, agama, dan isu perbatasan yang disebarkan melalui platform media sosial dan jejaring komunitas lokal, khususnya WhatsApp dan Facebook. Aktor utama penyebaran disinformasi meliputi simpatisan politik, tim sukses, dan akun anonim dengan jejaring lintas wilayah. Disinformasi tersebut berdampak nyata pada integritas pemilu dengan memicu polarisasi politik, meningkatkan laporan pelanggaran, serta menghambat proses kampanye dan distribusi logistik di beberapa daerah. Temuan ini memperkaya literatur tentang disinformasi dan integritas pemilu dengan menyoroti dinamika khusus di wilayah perbatasan, yang selama ini kurang diperhatikan dalam studi-studi sebelumnya. Secara praktis, hasil penelitian merekomendasikan perlunya penguatan literasi digital masyarakat, optimalisasi peran tokoh adat dan agama, serta peningkatan sinergi antarlembaga dalam menangani disinformasi berbasis lokal. Penelitian lanjutan disarankan untuk mengeksplorasi model intervensi berbasis komunitas dan penggunaan teknologi adaptif dalam mengatasi disinformasi di wilayah perbatasan lainnya di Indonesia atau kawasan serupa secara global.

DAFTAR PUSTAKA

Adisa, R. M., Segbefia, S. K., Mohammed, S., & Trofimova, G. N. (2024). Misinformation and disinformation in ethno-religious conflicts: a comparative study of media in Ghana and Nigeria. *Вестник Российского Университета Дружбы Народов. Серия: Литературоведение*,

- Журналистика*, 29(2), 346–357.
- Arifianto, M. H., Hamdi, M., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Collaborative Governance Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif Tahun 2024 di Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Statistik Indonesia*, 5(1), 149–215.
- Barela, S. J., & Duberry, J. (2021). Understanding disinformation operations in the 21st century. *Defending Democracies: Combating Foreign Election Interference in a Digital Age* (Duncan B. Hollis & Jens David Ohlin, Eds., OUP).
- Colomina, C., Margalef, H. S., Youngs, R., & Jones, K. (2021). The impact of disinformation on democratic processes and human rights in the world. *Brussels: European Parliament*, 1–19.
- Fontana, I. (2022). The human (in) security trap: how European border (ing) practices condemn migrants to vulnerability. *International Politics*, 59(3), 465–484.
- Garnett, H. A., & James, T. S. (2020). Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of technology for electoral integrity. *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy*, 19(2), 111–126.
- Haider, M. (2024). Political Polarization in the Digital Age: Understanding Social Dynamics. *Physical Education, Health and Social Sciences*, 2(1), 19–30.
- Lecheler, S., & Egelhofer, J. L. (2022). Disinformation, misinformation, and fake news: Understanding the supply side. *Knowledge Resistance in High-Choice Information Environments*, 69–87.
- Lee, T. (2019). The global rise of “fake news” and the threat to democratic elections in the USA. *Public Administration and Policy*, 22(1), 15–24.
- Luwemba, M. (2023). Re-conceptualising Voter Apathy in Modern Day Democracies: A Causal Effect Relationship. *Islamic University Journal of Social Sciences*, 2(2), 43–66.
- Norris, P. (2022). Challenges in Electoral Integrity. In *Routledge Handbook of Election Law* (pp. 87–100). Routledge.
- Ologunbe, J., & Taiwo, E. O. (2025). The impact of digital communication on governance, political dynamics, and leadership; A case study of the Nigerian people and process. *Political Dynamics, and Leadership*.
- Oyewale, P. O. (2024). The Role of Faith Based Organisation in the Electoral Process in Nigeria. *Polit Journal Scientific Journal of Politics*, 4(4), 240–252.
- Tenove, C. (2020). Protecting democracy from disinformation: Normative threats and policy responses. *The International Journal of Press/Politics*, 25(3), 517–537.
- Zhen, L., Yan, B., Tang, J. L., Nan, Y., & Yang, A. (2023). Social network dynamics, bots, and community-based online misinformation spread: lessons from anti-refugee and COVID-19 misinformation cases. *The Information Society*, 39(1), 17–34.